



Sutarmidji Kaget Perjalanan Dinas Kalbar Rp220 Miliar Setahun

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji kaget setelah melihat Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalbar 2019, hampir tak mengakomodir visimisinya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan. Gu-

bernur yang baru dilantik awal September ini mengungkapkan salah satu programnya, yakni pendidikan gratis untuk SMA/SMK malah tak dianggarkan. Padahal sudah sejak awal dia minta semua disesuaikan

• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ sutarmidji kaget

dengan visi-misinya membangun Kalbar.

"Tapi yang paling kaget lagi, biaya perjalanan dinas totalnya setahun Rp220-an miliar. Belum sampai di situ, dan yang tak kalah kagetnya, ternyata mobil dinas ada 1.216 buah," tulisnya di *fanspage* Facebook Bang Midji, Sabtu (15/9), pukul 23.44 WIB.

Dalam unggahannya, dia juga mengatakan, akhirnya dia memutuskan untuk memangkas separuh biaya perjalanan dinas dan mobil dinas, untuk dialokasikan ke pendidikan gratis.

"Alhamdulillah selesai satu janji. Inshaallah saya akan sampaikan kejutan-kejutan lain, biar masyarakat Kalbar tahu duit APBD untuk apa aja," katanya.

Unggahan itu pun viral dan banyak dikomentari netizen. Hingga pukul 19.00

WIB, Minggu (16/9), sudah ada 2,5 ribu komentar dan 1,8 kali unggahan itu dibagikan di Facebook.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengaku mengapresiasi program pendidikan gratis SMA/SMK yang ditetapkan Sutarmidji. Berdasarkan hitungan pihaknya, diperlukan dana berkisar Rp100-200 miliar untuk mewujudkan hal itu. Langkah Sutarmidji yang memotong pos perjalanan dinas dan mobil dinas pun dia dukung. Termasuk jika ingin melelang mobil dinas itu.

"Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk efisiensi biaya tentu akan didukung oleh DPRD Provinsi, karena tentu akan dialokasikan dana tersebut ke hal-hal yang lebih prioritas, untuk kesejahteraan dan pembangunan di Kalbar,"

katanya, Minggu (16/9).

Politisi Gerindra ini menuturkan, masih banyak pos pembiayaan yang bisa diefisienkan. Misalnya honor panitia pelaksana kegiatan yang dilakukan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Palsanya, apa yang dilakukan di jam kerja, sudah dibayar digaji pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja lainnya.

"Saya rasa kalau diteliti lebih lanjut, masih akan ada biaya yang bisa kita efisiensi. Kami dalam rapat badan anggaran dan rapat komisi-komisi di DPRD Provinsi akan membantu Gubernur untuk mensinyalir lebih teliti lagi," sebutnya.

Namun, legislator dari partai yang tidak mengukung Sutarmidji ini menjelaskan, untuk perjalanan dinas DPRD Provinsi, semua sudah diatur undang-undang dan

tata tertib DPRD. Misalnya ketika membahas rancangan peraturan daerah, diperlukan konsultasi ke instansi lain atau studi banding ke DPRD provinsi lain. Untuk pos itu, menurutnya tidak bisa dilakukan efisiensi.

"Terhadap hal-hal itu tentu tidak bisa dilakukan efisiensi karena ada dasarnya. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan efisiensi, tentu sesuatu yang tidak menyangkut langsung dari apa yang kami sampaikan tersebut," katanya.

Dia meminta masyarakat tidak salah duga, karena apa yang dilakukan di DPRD adalah untuk kepentingan masyarakat. "Saya rasa kita sepakat mendukung Gubernur untuk efisiensi, baik biaya dan untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Barat," tutupnya. **(nak/bls)**